



**RANCANGAN AWAL RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat terwujud. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dan menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025.

Tanggal, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,



H. AREADY

Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP.19750302 200212 1004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN BERJALAN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2023	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	27
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	31
2.4 Review terhadap Ranwal RKPD	38
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat....	46
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	49
3.3 Program dan Kegiatan	50
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	52
BAB V. PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Organisasi Perangkat Daerah	16
Tabel T-C.29.a Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD	30
Tabel T-C.29.b Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah BPKAD	33
Tabel T-C. 29.c Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas BPKAD.....	34
Tabel T-C. 29.d Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi BPKAD	37
Tabel T-C. 31 Review Terhadap RKPD Tahun 2024	39
Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2024 Kabupaten Bengkalis.....	47
Tabel T-C. 33 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 BPKAD	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Bengkalis. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Bengkalis, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Bengkalis dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 3 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 disusun dengan maksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Bengkulu, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu, kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2026. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan kebutuhan anggaran

program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RPKD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dan/atau realisasi APBD untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

1.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sesuai dengan hasil evaluasi renja tahun 2023 dari 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sesuai dengan hasil evaluasi renja tahun 2023 dari 3 (tiga) Program Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD.
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - h. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor
 - d. Sub Kegiatan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS,
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - j. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - k. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - l. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
 8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

- c. Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinsronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penegelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - h. Sub Kegiatan Rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait
 - i. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO dan Beban
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
 - d. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - g. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
10. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 11. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - e. Sub Kegiatan Inventaris Barang Milik Daerah
 - f. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - g. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
 - h. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - i. Sub Kegiatan Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - j. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - k. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sesuai dengan hasil evaluasi renja tahun 2023 dari 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu :

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan Evaluasi Renja Tahun 2023 dapat diketahui bahwa secara umum program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain :

- a. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal, yang disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan;

Namun demikian terdapat juga beberapa kegiatan yang telah mencapai target bahkan dapat melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan;
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target program dan kegiatan akan mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, sehingga berdampak lambatnya pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah . memperhatikan kondisi tersebut kebijakan yang di ambil oleh Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengatasi faktor-faktor penyebab sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran dan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah;
4. Penetapan target indikator kinerja yang lebih terukur;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Beberapa kebijakan/Tindakan perencanaan :

1. Melakukan Penyesuaian APBD Tahun 2023 berupa Pergeseran Anggaran sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi.

2. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran dan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan dan melakukan efisiensi anggaran.
3. Memprioritas kegiatan yang strategi guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.

Kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun 2023 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana walaupun dipertengahan tahun terdapat program revocussing, namun dapat diselesaikan pada saat APBD Perubahan. Dari 3 (sembilan) program dengan 13 kegiatan, 74 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%.

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 94.48% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember). Capaian indikator Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2023 sebesar 96.44% % dari target 97%. Capaian Indikator Program Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2023 sebesar 94.48% dari target 95%.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut :

Tabel T-C.29



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
 PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2023
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 TRIWULAN 4

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 11

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung								
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			213.200.248.570,00	-	68.047.315.675,00	54.856.640.567,00	6.871.665.211,00	22.332.022,39	6.867.999,60	10.453.737,26	-	45.325.424.329,00	-	113.372.740.004,00	-	53,16				Badan Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah		
	01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				941.285.948,00	901.121.648,00	0	148.607.251,00	0	193.002.980,00	0	167.163.760,00	0	367.872.982,00	0	876.645.773,00	0	1.817.931.721,00	0	-			
	01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18 Dokumen	2.374.787.400,00	3	311.502.500,00	329.748.400,00	1	66.734.900,00	0	83.625.500,00	1	60.169.200,00	1	132.290.000,00	3,00	322.809.600,00	6,00	634.312.100,00	33,33	26,71		
	01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	6 Dokumen	1.237.433.442,00	1	146.648.341,00	150.483.600,00	0	0,00	0	0,00	0	75.065.760,00	1	66.989.940,00	1,00	142.055.700,00	2,00	288.704.041,00	33,33	23,33		
	01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Lapran Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	613.643.244,00	1	101.958.499,00	102.273.200,00	0	0,00	0	0,00	0	14.502.400,00	1	82.771.965,00	1,00	97.273.755,00	2,00	199.232.254,00	33,33	32,47		

Print By : MONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
					6		7			8		9		10		11			12		13 = 9+10+11+12			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	849.465.396,00	1	199.659.440,00	1	141.577.100,00	0-	36.163.361,00	0	0	61.905.800,00	0-	8.634.000,00	1	34.500.338,00	1,00	140.603.489,00	2,00	340.262.929,00	33,33	40,06		
		01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.062.229.248,00	1	161.517.168,00	3	177.038.000,00	2	55.709.000,00	0	0	48.071.080,00	0-	18.802.400,00	1	61.920.749,00	3,00	173.903.229,00	4,00	385.420.397,00	66,67	33,46		
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-	10.646.625.245,00		13.796.510.448,00	0	5.206.883.612,00	0	0	4.309.412,26	0	3.074.352,65	0	3.138.545,48	-	15.722.993.877,00		26.569.619.122,00	-	-		
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600%	77.997.613.788,00	100	9.882.759.395,00	64	23.808.552.887,00	0-	5.101.780.912,00	0	0	4.001.146,95	0-	2.863.132,75	64	2.957.890,65	64,00	14.923.950.677,00	184,00	24.906.710.072,00	27,33	31,80		
		01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600%	1.213.201.800,00	100	207.290.500,00	1	222.196.800,00	0-	48.427.700,00	0	0	89.623.300,00	0-	42.539.200,00	1	32.763.000,00	1,00	210.353.200,00	101,00	417.643.700,00	16,83	34,42		
		01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	871.407.300,00	1	221.579.600,00	1	170.228.400,00	0	0,00	0	0	44.067,100,00	0-	60.727.900,00	1	60.478.800,00	1,00	155.273.800,00	2,00	376.853.400,00	33,33	43,25		
		01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	600%	1.431.196.800,00	100	261.671.050,00	1	189.448.000,00	0-	66.428.000,00	0	0	92.414,400,00	1	56.967,000,00	0	0,00	1,00	205.799.400,00	101,00	467.470.450,00	16,83	32,66		
		01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semester SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/trwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semester SKPD	12 Laporan	1.266.162.600,00	2	273.324.700,00	2	237.447.000,00	0-	3.047.600,00	0	0	76.160,800,00	0-	60.895.700,00	2	97.413,000,00	2,00	227.616.800,00	4,00	500.941.500,00	33,33	39,56		
		01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-	387.519.000,00		384.000.000,00	0	51.200.000,00	0	0	76.800.000,00	0	76.800.000,00	0	182.480,000,00	-	387.280.000,00		774.799.000,00	-	-		
		01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	120 Orang	2.227.200.000,00	18	387.519.000,00	1	464.640.000,00	0-	51.200.000,00	0	0	76.800.000,00	0-	76.800.000,00	1	182.480,000,00	1,00	387.280.000,00	19,00	774.799.000,00	15,83	34,79		

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung					
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/8 x 100%		(16)
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	871.680.000,00		694.014.000,00	0	62.507.780,00	0	318.984.429,00	0	0,00	0	105.600.000,00	-	487.092.189,00		1.386.772.189,00	-	-		
		01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai	597 Orang	4.306.257.192,00	97	871.680.000,00	97	493.772.000,00	9 Orang	62.507.780,00	0	318.984.429,00	0	0,00	74	105.600.000,00	83,00	487.092.189,00	180,00	1.386.772.189,00	30,15	31,55	
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	2.903.929.787,00		2.247.204.761,00	0	437.282.807,00	0	634.654.759,00	0	634.461.643,00	0	2.076.751,18	-	3.683.020.189,00		6.586.948.958,00	-	-		
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	180 Jenis	886.862.000,00	21	122.739.000,00	2	120.731.000,00	0-	19.626.000,00	0	20.389.400,00	0-	23.673.600,00	2 Paket	43.100.000,00	2,00	106.787.900,00	23,00	229.526.900,00	12,78	25,89	
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	384 Jenis	3.200.556.000,00	40	288.626.800,00	2	274.181.900,00	0-	33.451.600,00	0	67.273.000,00	0-	73.894.800,00	2 Paket	62.776.400,00	2,00	237.395.800,00	42,00	526.022.600,00	10,94	16,44	
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	5100 Box	1.195.920.000,00	860	187.758.000,00	1	144.320.000,00	0-	23.750.000,00	0	9.800.000,00	0-	42.260.000,00	1 Paket	66.480.000,00	1,00	141.060.000,00	851,00	328.816.000,00	16,68	27,49	
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	78 Item	523.729.800,00	13	101.136.200,00	1	87.286.100,00	0-	5.600.000,00	0	12.300.000,00	0-	27.300.000,00	1 Paket	41.835.500,00	1,00	87.035.500,00	14,00	188.171.700,00	17,96	35,93	
		01.2.06.08.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	162 Exeempler	183.600.000,00	27	48.600.000,00	1	54.000.000,00	0-	8.100.000,00	0	12.150.000,00	0-	4.050.000,00	1 Dokumen	23.700.000,00	1,00	48.000.000,00	28,00	96.600.000,00	17,28	52,61	
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3360 Kali	7.092.944.766,00	560	1.745.939.787,00	1	1.567.005.000,00	0-	274.635.407,00	0	409.322.359,00	0-	353.493.343,00	1 Laporan	466.347.781,00	1,00	1.503.698.888,00	561,00	3.249.638.656,00	16,70	45,82	
		01.2.06.10.	Penatuaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatuaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6 Kegiatan	1.918.798.800,00	1	303.623.900,00	1	231.453.900,00	0-	72.210.600,00	0	59.340.000,00	0-	9.800.000,00	1 Dokumen	83.844.500,00	1,00	225.195.100,00	2,00	528.819.000,00	33,33	27,86	
		01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Paikaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18 Media	1.035.201.000,00	3	105.508.100,00	1	1.480.797.500,00	0-	0,00	0	44.180.000,00	0	0,00	1 Dokumen	1.289.667,00	1,00	1.333.847.000,00	4,00	1.439.355.100,00	22,22	100,00	
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	43.680.522.400,00		17.696.804.892,00	0	0,00	0	15.027.425,260,00	0	698.300.000,00	0	2.390.482,00	-	18.116.217.250,00		61.796.739.650,00	-	-		

No.	Sasaran RPKD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung								
					6				7		8		9		10			11				12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Item	26.939.292.466,00	2	40.161.538.000,00	11 Unit	16.201.000.000,00	0	0,00	10 unit	18.027.425.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 Unit	476.253.000,00	11,00	16.200.978.250,00	13,00	56.362.516.250,00	100,00	100,00	
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1200 Unit	6.049.258.660,00	200	1.304.854.400,00	200 Unit	459.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200 Unit	448.497.000,00	200,00	448.497.000,00	400,00	1.753.351.400,00	33,33	28,98			
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	210 Unit	18.799.298.000,00	95	2.214.130.000,00	95 Unit	1.472.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	95 Unit	1.486.742.000,00	35,00	1.486.742.000,00	70,00	3.680.872.000,00	33,33	19,58			
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.691.462.167,00		2.907.346.932,00	0	508.465.781,00	0	714.713.602,00	0	693.424.507,00	0	973.166.347,00		2.890.770.237,00		5.682.232.404,00								
		01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	634 Orang	12.721.200.000,00	101	2.109.200.000,00	1 Laporan	2.172.320.000,00	0	337.600.000,00	0	530.065.000,00	0	525.250.000,00	1 Laporan	716.749.000,00	1,00	2.109.664.000,00	102,00	4.209.864.000,00	16,09	33,09					
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Kegiatan	3.557.422.752,00	3	523.993.407,00	1 Laporan	704.917.018,00	0	158.876.821,00	0	166.665.162,00	0	150.191.069,00	1 Laporan	229.693.627,00	1,00	706.426.579,00	4,00	1.230.419.986,00	22,22	34,59					
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Orang	371.372.160,00	2	67.268.760,00	1 Laporan	92.843.040,00	0	11.888.960,00	0	17.983.440,00	0	17.983.438,00	1 Laporan	26.723.820,00	1,00	74.679.658,00	3,00	141.948.418,00	25,00	38,22					
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Dokumen	10.246.387.794,00	1	1.124.602.240,00	12 Unit	1.349.400.000,00	0	76.403.326,00	0	475.978.000,00	0	241.900.899,00	12 Unit	436.437.115,00	12,00	1.229.617.339,00	13,00	2.354.219.579,00	100,00	22,98					
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	312 Unit	3.623.380.332,00	98	762.311.846,00	98 Unit	753.896.722,00	0	168.219.875,00	0	369.749.318,00	0	34.830.500,00	98 Unit	331.719.232,00	38,00	894.518.925,00	76,00	1.656.830.771,00	24,36	45,73					
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunannya yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	120 Orang	2.201.600.000,00	20	360.000.000,00	2 Unit	534.000.000,00	0	60.800.000,00	0	91.200.000,00	0	91.200.000,00	2 Unit	121.600.000,00	2,00	364.800.000,00	22,00	724.800.000,00	18,33	32,92					

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung						
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	06 Kegiatan	17.203.087.940,00	6	3.477.377.062,00	2 Unit	676.930.000,00	0 -	1.60.525.000,00	0 0	126.904.400,00	0 -	55.565.650,00	2 Unit	330.073.500,00	2,00	672.468.550,00	10,00	4.149.945.612,00	15,15	24,12			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											17,82	13,27	47,16	25,32	60,12	16,29	95,39	39,01	98,72	93,05					30,31	37,20	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1.996.369.726.915,00	-	537.860.166.558,00		675.732.918.622,00		80.532.302,48 8,00		122.415,173 237,00		154.036,492 987,00		279.695,570 576,00		636.681.538.288,00		174.541.705.846,00		59,13			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	02.2.01.	Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				-	-	10.282.584.478,00		10.339.853.982,00	0	594.606.739,00	0	1.910.085,85 9,00	0	1.988.872,40 9,00	0	5.631.638,46 0,00	-	10.134.903,461,00		20.417.487,938,00	-	-			
	02.2.01.01.	Kordinasi dan Penyusunan KUAdan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dokumen	1.908.634.375,00	2	318.656.260,00	2 Dokumen	475.757.500,00	0	0,00	0 0	44.118,000,00	0 -	67.558,760,00	2 Dokumen	441.948,240,00	2,00	553.626,000,00	4,00	872.281,260,00	33,33	45,70			
	02.2.01.02.	Kordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12 Dokumen	2.799.749.337,00	60	381.247.526,00	2 Dokumen	496.456.500,00	0	0,00	0 0,00	0 -	12.634,456,00	2 Dokumen	614.737,036,00	2,00	627.371,494,00	62,00	1.008.619,420,00	100,00	36,03				
	02.2.01.03.	Kordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	282 SKPD	4.842.217.502,00	47	318.860.928,00	1 Dokumen	938.114,000,00	0	0,00	0 0	22.668,740,00	0 -	94.816,400,00	1 Dokumen	919.148,200,00	1,00	1.036.522,340,00	48,00	1.355.403,268,00	17,02	27,99			
	02.2.01.04.	Kordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	282 SKPD	2.027.765.376,00	47	395.902.225,00	1 Dokumen	360.250,000,00	0	0,00	0 0,00	0	0,00	0,00	1 Dokumen	390.245,175,00	1,00	390.245,175,00	48,00	786.047,400,00	17,02	38,76			
	02.2.01.05.	Kordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	4982 SKPD	2.367.339.681,00	47	962.172.175,00	1 Dokumen	1.076.147.700,00	0 -	40.690,200,00	0 0	37.510,925,00	0 -	282.039,274,00	1 Dokumen	42.991,275,00	1,00	403.231,674,00	48,00	1.365.403,848,00	0,96	57,68			
	02.2.01.06.	Kordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	282 SKPD	2.336.404.839,00	47	338.342.250,00	1 Dokumen	816.792,000,00	0	0,00	0 0,00	0 -	64.003,828,00	1 Dokumen	137.404,442,00	1,00	201.408,270,00	48,00	537.790,520,00	17,02	23,02				

No.	Sasaran RPKD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung								
					6				7		8		9		10			11				12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	(16)							
	02.2.01.07.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 Dokumen	15.899.719.885,00	47 -	2.764.236.085,00	1 Dokumen	3.336.300.700,00	0- 0	207.407.780,00	0 0	1.241.211,34 2,00	0- 0	263.121.974,00	1 Dokumen	1.449.937,01 3,00	1,00	3.161.678.109,00	48,00	5.926.914.194,00	100,00	37,27					
	02.2.01.08.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dokumen	15.273.761.279,00	85 -	1.750.301.780,00	1 Dokumen	1.157.681.300,00	0- 0	61.700.000,00	0 0	123.070,985,00	0- 0	69.845.600,00	1 Dokumen	793.391,796,00	1,00	1.048.008.381,00	86,00	2.798.310.161,00	100,00	18,32					
	02.2.01.09.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	18 Dokumen	5.084.296.718,00	3 -	1.986.488.487,00	3 dokumen	1.464.141.500,00	0- 0	164.884.487,00	0 0	222.757,168,00	0- 0	378.450,347,00	3 Dokumen	584.402,244,00	3,00	1.370.494.246,00	6,00	3.396.982.713,00	33,33	66,00					
	02.2.01.10.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	108 Kali	844.345.605,00	- -	- -	1 Dokumen	143.585.000,00	0 0	0,00	0 0	62.138.299,00	0- 0	64.695.923,00	1 Dokumen	11.901,750,00	1,00	128.135.972,00	1,00	128.135.972,00	0,93	15,18					
	02.2.01.11.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	268 Kali	2.001.449.583,00	48 -	195.322.812,00	1 Dokumen	256.984.000,00	0- 0	99.924.266,00	0 0	126.976,500,00	0- 0	16.973.400,00	1 Dokumen	11.901,750,00	1,00	257.175.916,00	49,00	452.498.728,00	17,01	22,61					
	02.2.01.12.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	160 Kali	853.865.269,00	- -	- -	1 Dokumen	145.206.000,00	0 0	0,00	0 0	27.743,900,00	0- 0	35.068,172,00	1 Dokumen	63.679,539,00	1,00	126.491.611,00	1,00	126.491.611,00	0,87	14,81					
	02.2.01.13.		Pembinaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Kabupaten/Kota	24 Bimtek	8.276.523.773,00	4 -	873.133.570,00	126 Orang	658.622.000,00	0 0	0,00	0 0	0,00	95 Orang	658.465,273,00	110 Orang	171.050,000,00	195,00	830.515.273,00	199,00	1.703.648.943,00	100,00	20,58					
	02.2.02.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	7.243.973.942,00	-	9.496.926.000,00	0	999.998.396,00	0	2.668.842,06,00	0	1.639.908,14,00	0	2.468.687,46,00	-	7.777.437.066,00	-	15.021.411.008,00	-	-						
	02.2.02.01.		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	4.050.000.000,00	1 -	850.593.003,00	1 Dokumen	511.884.000,00	0- 0	326.614.793,00	0 0	107.996,800,00	1 Dokumen	63.346,600,00	0	0,00	1,00	497.858.393,00	2,00	1.348.451.396,00	33,33	33,30					

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (t-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun t-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung						
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/8 x 100%		(16)	
		02.2.02.03.	Penyediaan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6	4.800.000.000,00	1	422.826.131,00	4	566.330.200,00	0-	190.568.850,00	0	0	180.269.200,00	0-	107.361.300,00	4	266.288.700,00	4,00	716.488.050,00	5,00	1.139.314.181,00	83,33	23,74	
		02.2.02.04.	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	6	3.675.000.000,00	1	479.066.516,00	1	408.528.500,00	0-	166.310.183,00	0	0	121.971.100,00	0-	95.460.900,00	1	16.960.000,00	1,00	399.122.153,00	2,00	878.188.669,00	33,33	23,90	
		02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	6	4.750.000.000,00	1	512.124.699,00	1	716.442.000,00	0-	95.673.100,00	0	0	333.092.757,00	0-	116.666.818,00	1	264.786.494,00	1,00	810.209.269,00	2,00	1.322.333.968,00	33,33	27,84	
		02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6	4.450.000.000,00	1	394.449.608,00	1	396.138.100,00	0-	90.442.500,00	0	0	138.247.900,00	0-	113.426.084,00	1	40.780.598,00	1,00	382.897.082,00	2,00	777.346.690,00	33,33	17,47	
		02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan	6	5.550.000.000,00	1	468.206.850,00	1	718.767.200,00	0-	49.391.000,00	0	0	336.789.040,00	0-	177.667.214,00	1	283.255.688,00	1,00	846.082.822,00	2,00	1.312.289.672,00	33,33	23,84	
		02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Plutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Plutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	6	5.700.000.000,00	1	784.326.463,00	1	688.571.000,00	0-	44.098.000,00	0	0	218.906.900,00	1	418.947.271,00	0	0,00	1,00	881.952.171,00	2,00	1.466.278.634,00	33,33	25,72	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPJ Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPJ Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/8 x 100%		(16)		
		02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	6.500.000.000,00	1	805.281.444,00	1	1.121.094.000,00	0	0,00	0	0	606.999.563,00	0	0	200.495.980,00	1	357.991.763,00	1,00	1.167.486.886,00	2,00	1.972.768.130,00	33,33	30,35	
		02.2.02.10.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	6 Dokumen	4.500.000.000,00	1	1.185.432.028,00	1	2.070.048.000,00	0	37.000.000,00	0	0	183.396.400,00	0	0	346.271.700,00	1	1.215.098.809,00	1,00	1.761.706.909,00	2,00	2.947.138.937,00	33,33	65,49	
		02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1180 Orang	14.250.000.000,00	268	1.343.867.200,00	200	514.440.000,00	0	0,00	0	0	480.882.400,00	0	0	285.800,00	60	32.605.531,00	60,00	513.633.531,00	328,00	1.857.300.731,00	27,80	13,03	
		02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				8.264.398.770,00		9.792.323.700,00	0	1.428.836.908,00	0	0	1.685.048.265,00	0	0	2.083.518,208,00	0	3.036.748,994,00	-	8.134.145,774,00		16.398.534.544,00	-	-		
		02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	600%	8.316.540.700,00	100	724.163.895,00	2	698.998.900,00	0	108.865,100,00	0	0	146.005,483,00	0	0	176.505,800,00	2	238.973,260,00	2,00	689.339,443,00	102,00	1.399.503.138,00	17,00	16,76	
		02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Beban dan Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	600%	2.781.575.200,00	100	278.362.200,00	6	400.400.700,00	0	145.242,100,00	0	0	39.000,000,00	0	0	144.570,000,00	6	23.332,600,00	5,00	352.144,700,00	105,00	630.508,900,00	17,50	22,67	
		02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran	12 Laporan	3.233.483.500,00	2	317.575.898,00	4	461.457.900,00	0	106.682,000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4	313.802,395,00	4,00	420.264,395,00	6,00	737.840,233,00	50,00	22,82	

No.	Sasaran RPKD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung			
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		(16)		
		02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Terkonsolidasi	1	8.533.974.500,00	1	736.546.500,00	1	1.498.626.600,00	0-	411.817.109,00	0 0	479.666.700,00	0-	395.989.298,00	1	161.794.100,00	1,00	1.439.267.197,00	2,00	2.175.813.697,00	33,33	22,82	
		02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	600%	20.439.627.000,00	100	3.687.707.600,00	2	3.864.206.400,00	0-	630.000.000,00	0 0	831.531.500,00	0-	1.174.485,840,00	2	1.229.800,600,00	2,00	3.765.817.940,00	102,00	7.453.525.540,00	17,00	36,47	
		02.2.03.06.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	600%	2.543.835.900,00	100	675.996.323,00	2	302.790.200,00	0-	23.400.000,00	0 0	88.842.682,00	0-	55.723.378,00	2	286.751.439,00	2,00	454.717.398,00	102,00	1.130.713.722,00	17,00	44,45	
		02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	600%	5.628.714.000,00	100	1.451.331.814,00	60	715.830.000,00	15	94.800.000,00	0 0	0,00	0	0,00	75	599.027.400,00	90,00	693.827.400,00	190,00	2.145.159.214,00	31,67	38,11	
		02.2.03.12.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Ditina	600%	2.795.117.000,00	100	392.704.800,00	1	399.968.700,00	0-	8.060.000,00	0 0	0,00	0-	147.242,100,00	1	183.465.200,00	1,00	338.767.300,00	101,00	731.472.100,00	16,83	26,17	
		02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				512.068.219.368,00		541.367.004.913,00	0	77.508.861,050,00	0	116.251.198,063,00	0	148.316.395,225,00	0	268.558.597,659,00		610.635.052.987,00		122.704.272.355,00				
		02.2.04.06.	Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	600%	1.655.180.259.150,00	99	512.069.219.368,00	1	648.116.203.229,00	0-	77.498.638,500,00	0 0	116.251.198,053,00	0-	148.316.395,225,00	1	268.558.597,659,00	1,00	610.622.030.437,00	100,24	122.691.249.805,00	16,71	67,83	
		02.2.04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	600%	153.179.528.363,00	-	-	1	5.232.156.793,00	0-	13.022.650,00	0 0	0,00	0	0,00	1	13.022.550,00	1,00	13.022.550,00	1,00	13.022.550,00	0,17	0,01	

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung									
								I		II		III		IV						13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/8 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								14,08	12,36	35,57	21,72	60,73	20,75	88,95	39,25	95,01	89,01			32,41	30,50							
Prediksi Kinerja Program								Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Normal	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
03.			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILK DAERAH		31.733.290.386,00	-	4.318.810.904,00		5.777.575.100,00		995.956.615,00		777.858.262,00		1.488.382,90		2.373.330,59		5.015.228.371,00		9.334.038.275,00		29,41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
03.2.01.			Pengelolaan Barang Milk Daerah		-	-	4.318.810.904,00		7.847.976.337,00		0		995.956.615,00		777.858.262,00		0		1.488.382,90		2.373.330,59		5.015.228.371,00		9.334.038.275,00		-	-
03.2.01.01.			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6	1.750.390.400,00	1	275.060.200,00	1	300.758.900,00	0	0,00	0,00	44.315.000,00	0	199.700,00	1	41.730.400,00	1,00	285.745.400,00	2,00	580.805.600,00	33,33	32,04				
03.2.01.03.			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah	6	2.536.740.148,00	1	198.079.100,00	1	457.702.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	109.800,00	1	282.842.800,00	1,00	408.332.600,00	2,00	606.411.700,00	33,33	23,91				
03.2.01.05.			Penatausahaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah	8	7.518.787.900,00	1	823.665.796,00	1	1.423.488.400,00	0	0,00	0,00	137.187,200,00	0	292.832,200,00	1	805.802,159,00	1,00	1.253.373.239,00	2,00	2.077.039.036,00	33,33	27,62				
03.2.01.07.			Pengamanan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milk Daerah	6	3.071.793.876,00	1	570.805.450,00	1	230.080.000,00	0	0,00	0,00	48.665.000,00	0	119.225,800,00	1	226.573,020,00	1,00	461.736.820,00	2,00	1.032.542.270,00	33,33	33,61				
03.2.01.08.			Penilaian Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah	6	1.702.962.000,00	1	188.806.600,00	1	238.893.000,00	0	0,00	0,00	2.610.000,00	0	18.095.500,00	1	54.328.200,00	1,00	96.369.100,00	2,00	286.175.700,00	33,33	16,75				
03.2.01.09.			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	240	2.220.000.000,00	1	694.700.476,00	1	526.868.000,00	0	0,00	0,00	300.617.000,00	0	89.190.000,00	1	26.610.000,00	1,00	535.690.815,00	2,00	1.230.391.291,00	0,83	55,42				
03.2.01.10.			Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	6	2.867.244.000,00	1	211.144.000,00	1	408.502.600,00	0	0,00	0,00	18.650.000,00	0	37.407.200,00	1	189.896.588,00	1,00	255.456.188,00	2,00	466.600.188,00	33,33	17,36				

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/8 x 100%		(16)
		03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	6 Laporan	2.082.999.800,00	1	145.914.800,00	1	317.500.000,00	0	14.960.000,00	0	33.417.400,00	0	32.694.000,00	1	229.007.800,00	1,00	310.269.200,00	2,00	456.184.000,00	33,33	21,90	
		03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Barang Milk Daerah yang Disusun	16 Laporan	3.405.829.000,00	1	480.535.600,00	1	788.314.600,00	0	69.193.320,00	0	30.850.000,00	0	111.095.200,00	1	239.991.100,00	1,00	451.069.620,00	2,00	911.605.220,00	12,50	26,77	
		03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	750 Orang	4.756.544.482,00	120	750.098.882,00	100	1.109.467.600,00	0	0,00	0	161.236.662,00	0	518.140.000,00	76	277.808.727,00	76,00	957.165.389,00	196,00	1.707.284.271,00	26,13	35,89	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8,38	8,64	18,43	13,73	53,82	26,39	89,75	43,34	89,75	81,86			31,70	29,13	
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)											13,43	11,42	33,72	20,25	73,62	21,14	94,39	40,85	96,16	93,67			22,14	33,92	
Predikat Kinerja OPD											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya*):																									

*) Dilisi oleh Kepala Bappeda

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sampai akhir Desember 2023, semua program/kegiatan yang dilaksanakan **sudah** memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat **berjalan** dengan baik sesuai rencana.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem Monev dan SIPD membantu kerja bidang-bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu sertifikasi tanah membutuhkan waktu dalam proses di BPN serta adanya keterbatasan Kuantitas pegawai serta belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang pada kondisi tahun 2023 dalam proses usulan ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

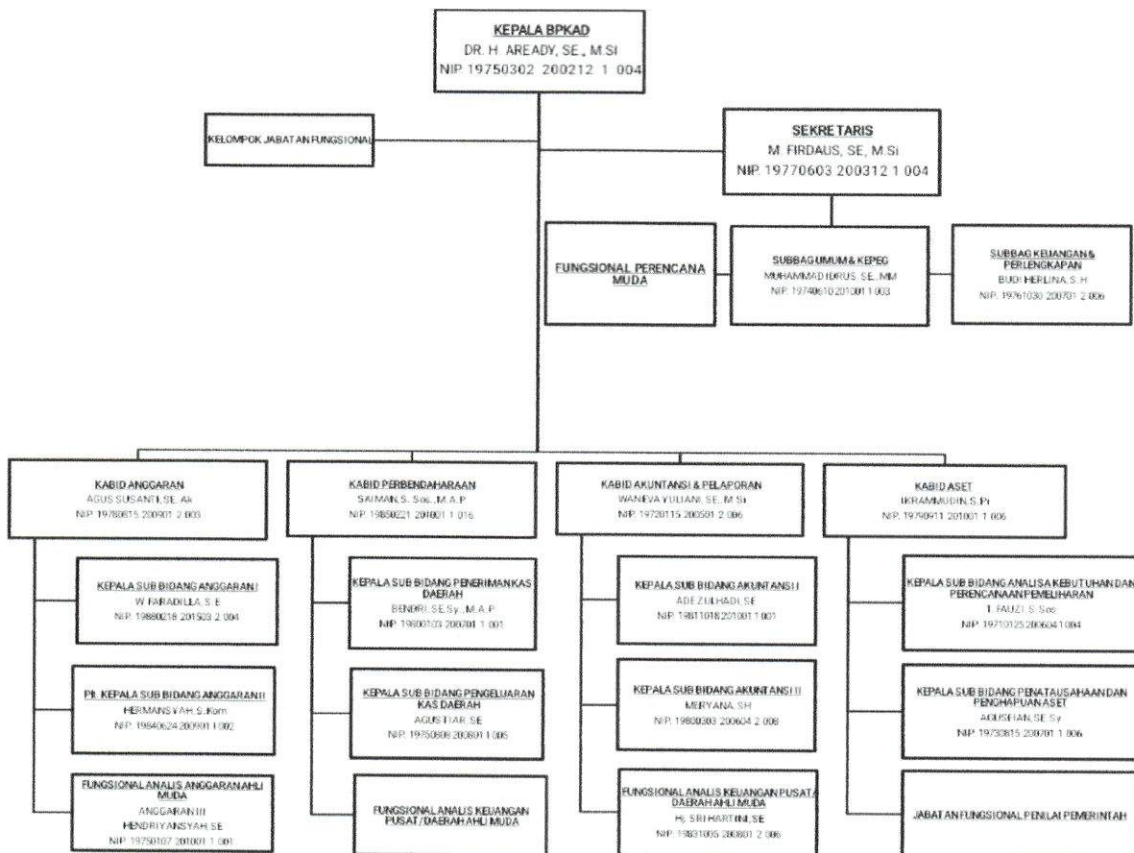
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Kelompok JF
3. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran I;
 - b. Sub Bidang Anggaran II; dan
 - c. Kelompok JF.
 4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah; dan
 - c. Kelompok JF.
 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi I;
 - b. Sub Bidang Akuntansi II; dan
 - c. Kelompok JF
 6. Bidang Aset, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset; dan
 - c. Kelompok JF.
 7. Kelompok JF.

GAMBAR II.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan dan Aset Daerah terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada OPD terkait dalam pengembangan pelayanan, tujuannya adalah agar segala urusan penatausahaan keuangan dan penatausahaan asset lebih baik lagi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;
2. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

3. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 di sajikan pada table berikut :

Tabel T-C.29.a
Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis

Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur		-	50%	55%	60%	65%	70%		60%	55%	60%	
Persentase Pemanfaatan Kekayaan Aset Daerah yang Menunjang Peningkatan PAD		-	40%	45%	50%	55%	75%		35%	45%	50%	
Ketepatan waktu Penyusunan APBD		-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
Persentase bendahara pengeluaran yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggung jawaban		-	86%	87%	88%	89%	90%		86%	87%	88%	
Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		-	70	73	75	78	80		BB	73	75	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah "**Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan dan ASet Daerah Kabupaten Bengkalis**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa Belum Optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2. Belum tepat waktunya penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
3. Masih belum terintegrasikannya system informasi akuntansi dengan asset
4. Belum optimalnya penatausahaan aset daerah Kabupaten Bengkulu.

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Dearah lebih kepada permasalahan eksternal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar II-2
Kerangka Permasalahan Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu



Berdasarkan Permasalahan dan isu strategi tersebut maka perlu di lakukan strategi dan arah kebijakan. Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.29.b

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Kualitas Penganggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Proses Penganggaran APBD	Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan penyusunan APBD	Kurangnya sosialisasi komunikasi dan interanlisasi dan designisasi Belum ada kesepakatan pemberian sanksi kedua pihak antara pemerintah dan DPRD dalam proses penganggaran sesuai siklus yang ditetapkan kemendagri
2.	Belum Tepat Waktu Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Belum tepat waktunya penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Keterlambatan penyiapan pertanggungjawaban keuangan pelaksana kegiatan oleh perangkat daerah
3.	Penyampaian Pelaporan Keuangan	Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset	Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD;
		Masih rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan masing-masing OPD;	Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD;

			Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.
4.	Belum Optimalnya Penatausahaan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis	Masih rendahnya kualitas pengelolaan Aset daerah	Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum Masih banyaknya aset yang belum dihapus
		Belum Optimalnya Managemen Aset Daerah Kabupaten Bengkalis	Kurangnya Pemahaman Tentang Pemanfaatan Aset yang Bisa Menghasilkan PAD

Tabel T-C.29.c

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpensi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Belum Tercapai		
5.02	Keuangan		Belum optimalnya kualitas penganggaran dan penataan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan meningkatkan penatausahaan aset daerah.
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			

2.3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , yaitu:

- a) Diperlukannya pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara baik, efektif dan efisien secara bersesuaian dengan tuntutan perubahan terutama dalam hal kemajuan teknologi dan informasi.
- b) Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera. Bila pengelolaan aset dan kekayaan daerah dapat dilakukan secara baik, efektif dan efisien untuk mendukung visi Bupati Bengkalis.
- c) Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani merupakan suplemen pendorong/tambahan semangat/momentum bagi BPKAD untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kewenangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

- Telah dilakukan Asistensi/pendampingan penyusunan APBD
- Komitmen antara Kepala Daerah dan DPRD untuk menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD
- Telah dilakukan verifikasi terhadap rancangan PPAS sehingga dapat segera menindaklanjuti hasil catatan verifikasi dan PPAS yang ditetapkan sudah selaras dengan RKPD.
- Telah dibangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul pelaksanaan/penatausahaan untuk mempercepat proses penerbitan SP2D dan sudah online untuk seluruh SKPD di Kab. Bengkalis.
- Telah dibangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul Pertanggungjawaban secara akrual untuk mempercepat proses penyusunan laporan keuangan daerah.

2. Faktor penghambat

- Adanya kesalahan sistem dalam membaca data/error yang mengakibatkan ketidak sinkronan program dan kegiatan di dokumen Musrenbang, dokumen RKPD maupun PPAS.

- Dokumen Dikembalikan ke SKPD karena terdapat kesalahan sehingga tidak dapat diproses.
- Penyampaian dokumen SPM melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan (3 Hari)
- Belum Mendapatkan Nilai penyusutan Aset
- Adanya Perubahan Akun terhadap aset mengikuti permendagri No. 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Adanya data aset yang belum tercatat dalam sistem karena adanya penghapusan dan pengabungan SKPD.
- Kurangnya dokumen pendukung

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Bupati Bengkalis yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T.C.29.d

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset.	Persentase Petumbuhan PAD	Pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara baik, efektif dan efisien	Melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan aset dan kekayaan daerah tepat guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Uni : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				54.724.412						
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				926.820						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bengkalis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	340.748						
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bengkalis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	150.484						
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bengkalis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	102.273						
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bengkalis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	141.577						
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bengkalis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	191.738						
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				22.822.956						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bengkalis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	22.025.961						
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bengkalis	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	202.200						
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bengkalis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	145.235						
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bengkalis	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	238.533						

NO	RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bengkalis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	211.027						
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				464.200						
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bengkalis	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	464.200						
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				693.772						
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bengkalis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	97 Orang	693.772						
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				4.119.096						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bengkalis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	120.731						
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	293.500						
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bengkalis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.320						
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bengkalis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	97.288						
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bengkalis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	54.000						
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.567.005						
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bengkalis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	306.454						
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bengkalis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.480.798						
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				19.093.642						
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bengkalis	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	17.000.000						

NO	RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengadaan Mebel	Bengkalis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200 Unit	927.472						
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bengkalis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	1.166.170						
7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.081.368						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.258.714						
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	729.811						
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	92.843						
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.522.558						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bengkalis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	1.707.731						
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bengkalis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	603.897						
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bengkalis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirhabilitasi	2 Unit	734.000						
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bengkalis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 Unit	476.930						
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				580.011.035						
1	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH				12.826.966						
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bengkalis	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	574.105						
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bengkalis	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	643.494						
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bengkalis	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1.163.924						
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bengkalis	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	833.232						

NO	RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bengkalis	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1.445.663						
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bengkalis	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	855.209						
7	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bengkalis	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	3.336.303						
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bengkalis	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1.159.163						
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bengkalis	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	1.436.493						
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	143.585						
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	256.984						
12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	145.206						
13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bengkalis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	128 Orang	833.604						
2	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH				9.850.000						
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	650.000						
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	600.000						
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	550.000						
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinsronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penegelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1.300.000						

NO	RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	600.000						
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Bengkalis	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	700.000						
7	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	600.000						
8	Rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1.300.000						
9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bengkalis	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	850.000						
10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bengkalis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	2.700.000						
3	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH				9.541.073						

NO	RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	890.429						
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO dan Beban	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Dokumen	400.411						
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Bengkalis	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	4 Laporan	561.597						
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Bengkalis	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1.776.795						
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bengkalis	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	2 Dokumen	4.034.398						
6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bengkalis	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	437.692						
7	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	Bengkalis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	60 Orang	965.830						
8	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Bengkalis	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	473.923						
4	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				547.792.996						
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	522.792.996						
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	25.000.000						
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		OPINI AUDIT TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH		6.187.166						
1	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				6.187.166						
1	Penyusunan Standar Harga	Bengkalis	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	312.598						
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bengkalis	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	434.185						

NO	RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bengkalis	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	434.737						
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bengkalis	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.287.079						
5	Inventaris Barang Milik Daerah	Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	348.231						
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	525.559						
7	Penilaian Barang Milik Daerah	Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	283.827						
8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Millik Daerah	Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	370.000						
9	Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bengkalis	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	447.874						
10	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	347.167						
11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bengkalis	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	567.638						
12	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bengkalis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	828.272						
TOTAL					640.922.613						

Bengkalis, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. AREADY

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750302 200212 1 004

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Urusan Penatausahaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2025. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik RPJMD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari reuiu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan Penatausahaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Bengkalis bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini:

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Bengkalis**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-
	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-
1.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	-
2.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bengkalis	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistic dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan Pembangunan nasional dengan perencanaan Pembangunan di Tingkat daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan Kawasan industri proritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata proritas, ekselerasi pengembangan energi terbarukan dan konvservasi energi, reformasi system perlindungan social, Kesehatan nasional dan Pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting , wilayah adat papua : laa pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan Pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. Sebagai RKP keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan trasisi energi;
7. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pemerintah telah mencanangkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan masal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan Langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemic menjadi endemik. Langkah kebijakan tersebut di harapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas Masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan Masyarakat antara lain meliputi :

- a. Peningkatan produktivitas diseluruh sektor ekonomi;
- b. Penguatan pemulihan social; dan
- c. Optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Program/kegiatan yang diusulkan didalam Renja PD Tahun 2025 hendaknya mencerminkan konsistensi terhadap tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penetapan tujuan merupakan deskriptif yang mengarah kepada perumusan kebijakan, sasaran, program/ kegiatan dalam rangka merealisasikan visi PD. Sedangkan sasaran menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur.

Adapun tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai acuan untuk menentukan program/kegiatan lanjutan tahun sebelumnya yang tetap dilaksanakan pada tahun berjalan;
2. Melakukan pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan maupun penambahan kegiatan baru; dan

3. Melakukan penambahan/pengurangan pagu indikatif, penambahan/pengurangan target kinerja, perubahan lokasi maupun kelompok sasaran kegiatan;

3.3 Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.3.1. Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 disusun mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja perangkat daerah tahun 2023. Selain itu, hasil capaian indikator sasaran kinerja tersebut telah selaras dengan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, baik sebagai indikator utama maupun pendukung berpedoman pada hasil pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis berpedoman pada arah kebijakan nasional yang terdapat pada Renstra Kementerian Keuangan, baik tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang menjadi prioritas nasional, juga mengacu pada arah

kebijakan Pembangunan Nasional berdasarkan RKP Tahun 2024 serta Renstra BPKAD Provinsi Riau.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan hasil review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas.
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 3 program di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 13 kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

2025 secara total sebesar Rp. 640.922.613.047,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis Program dan kegiatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana Tabel T-C.33:

TABEL T-C.33.
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2026 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2026	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				54.724.411.707	-	-		56.173.941.484
5 02 01 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				926.820.300	-	-		1.036.288.345
5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bengkalis	3 Dokumen	340.748.400		-	3 Dokumen	379.210.660
5 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Bengkalis	1 Dokumen	150.483.600		-	1 Dokumen	173.056.140
5 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Bengkalis	1 Dokumen	102.273.200		-	1 Dokumen	117.614.180
5 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bengkalis	1 Laporan	141.577.100		-	1 Laporan	162.813.665
5 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bengkalis	3 Laporan	191.738.000		-	3 Laporan	203.593.700
5 02 01 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				22.822.955.706	-	-		22.822.955.706
5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bengkalis	64 Orang/Bulan	22.025.960.956		-	64 Orang/Bulan	22.025.960.956

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2026					
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
										1	2	3	4
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bengkalis	1 Dokumen	202.200.300	-	-	1 Dokumen	202.200.300
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bengkalis	1 Laporan	145.234.550	-	-	1 Laporan	145.234.550
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bengkalis	1 Dokumen	238.532.800	-	-	1 Dokumen	238.532.800
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bengkalis	2 Laporan	211.027.100	-	-	2 Laporan	211.027.100
5	02	01	2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				464.200.000				464.200.000
5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bengkalis	1 Dokumen	464.200.000	-	-	1 Dokumen	464.200.000
5	02	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				693.772.000				717.709.532
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bengkalis	97 Orang	693.772.000	-	-	97 Orang	717.709.532
5	02	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				4.119.095.500				4.171.164.700
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Bengkalis	2 Paket	120.731.000	-	-	2 Paket	142.800.000
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bengkalis	2 Paket	293.500.000	-	-	2 Paket	293.500.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2026	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bengkalis	1 Paket	199.320.000	-	-	1 Paket	219.320.000
5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bengkalis	1 Paket	97.288.100	-	-	1 Paket	107.288.300
5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bengkalis	1 Dokumen	54.000.000	-	-	1 Dokumen	54.000.000
5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bengkalis	1 Laporan	1.567.005.000	-	-	1 Laporan	1.567.005.000
5 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bengkalis	1 Dokumen	306.453.900	-	-	1 Dokumen	306.453.900
5 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bengkalis	1 Dokumen	1.480.797.500	-	-	1 Dokumen	1.480.797.500
5 02 01 2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				19.093.642.000				20.357.697.000
5 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bengkalis	7 Unit	17.000.000.000			7 Unit	16.201.000.000
5 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bengkalis	200 Unit	927.472.000			200 Unit	1.023.491.000
5 02 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bengkalis	35 Unit	1.166.170.000			35 Unit	3.133.206.000
5 02 01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.081.368.180				3.081.368.180
5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bengkalis	1 Laporan	2.258.714.000			1 Laporan	2.258.714.000
5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bengkalis	1 Laporan	729.811.140			1 Laporan	729.811.140

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2026	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bengkalis	1 Laporan	92.843.040			1 Laporan	92.843.040
5 02 01 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.522.558.021				3.522.558.021
5 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bengkalis	12 Unit	1.707.731.299			12 Unit	1.707.731.299
5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bengkalis	38 Unit	603.896.722			38 Unit	603.896.722
5 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Bengkalis	2 Unit	734.000.000			2 Unit	734.000.000
5 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bengkalis	2 Unit	476.930.000			2 Unit	476.930.000
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				580.011.035.350				592.995.318.666
5 02 02 2.01	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH				12.826.966.000				14.026.302.200
5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Bengkalis	2 Dokumen	574.105.100			2 Dokumen	631.515.610
5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Bengkalis	2 Dokumen	643.494.000			2 Dokumen	707.843.400
5 02 02 2.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bengkalis	1 Dokumen	1.163.924.300			1 Dokumen	1.280.316.730
5 02 02 2.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bengkalis	1 Dokumen	833.232.200			1 Dokumen	916.555.420
5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Bengkalis	1 Dokumen	1.445.662.700			1 Dokumen	1.590.228.970
5 02 02 2.01 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bengkalis	1 Dokumen	855.208.900			1 Dokumen	940.729.790

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2026					
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
										1	2	3	4
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bengkalis	1 Dokumen	3.336.303.300			1 Dokumen	3.669.933.630
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bengkalis	1 Dokumen	1.159.163.300			1 Dokumen	1.275.079.630
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bengkalis	3 Dokumen	1.436.493.200			3 Dokumen	1.580.142.520
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bengkalis	1 Dokumen	143.585.000			1 Dokumen	157.943.500
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bengkalis	1 Dokumen	256.984.000			1 Dokumen	282.682.400
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bengkalis	1 Dokumen	145.206.000			1 Dokumen	159.726.600
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bengkalis	128 Orang	833.604.000			128 Orang	833.604.000
5	02	02	2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH				9.850.000.000				9.875.000.000
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bengkalis	1 Dokumen	650.000.000			1 Dokumen	650.000.000
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bengkalis	4 Dokumen	600.000.000			4 Dokumen	750.000.000
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bengkalis	1 Dokumen	550.000.000			1 Dokumen	700.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2026					
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
										1	2	3	4
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinsronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penegelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bengkalis	1 Dokumen	1.300.000.000			1 Dokumen	750.000.000
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bengkalis	1 Dokumen	600.000.000			1 Dokumen	700.000.000
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bengkalis	1 Laporan	700.000.000			1 Laporan	850.000.000
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis	Bengkalis	1 Dokumen	600.000.000			1 Dokumen	725.000.000
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bengkalis	1 Dokumen	1.300.000.000			1 Dokumen	1.200.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2026					
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
										1	2	3	4
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bengkalis	1 Dokumen	850.000.000			1 Dokumen	800.000.000
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Bengkalis	200 Orang	2.700.000.000			200 Orang	2.750.000.000
5	02	02	2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH				9.541.073.300				9.531.072.800
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	Bengkalis	2 Laporan	890.428.700			2 Laporan	880.428.700
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Bengkalis	5 Dokumen	400.410.500			5 Dokumen	400.410.500
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Bengkalis	4 Laporan	561.596.700			4 Laporan	561.596.700
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Bengkalis	1 Laporan	1.776.794.900			1 Laporan	1.776.794.400
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Bengkalis	2 Dokumen	4.034.397.500			2 Dokumen	4.034.397.500
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bengkalis	2 Dokumen	437.691.600			2 Dokumen	437.691.600

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2026					
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
										1	2	3	4
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	Bengkalis	60 Orang	965.830.000			60 Orang	965.830.000
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Bengkalis	1 Lembaga	473.923.400			1 Lembaga	473.923.400
5	02	02	2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				547.792.996.050				559.562.943.666
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bengkalis	1 Laporan	522.792.996.050			1 Laporan	534.562.943.666
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bengkalis	1 Laporan	25.000.000.000			1 Laporan	25.000.000.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	OPINI AUDIT TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH			6.187.165.990				6.384.290.414
5	02	02	2.03		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				6.187.165.990				6.384.290.414
5	02	02	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Bengkalis	1 Dokumen	312.597.600			1 Dokumen	312.597.600
5	02	02	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bengkalis	1 Dokumen	434.185.037,00			1 Dokumen	434.185.037,00
5	02	02	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bengkalis	1 Dokumen	434.736.800,00			1 Dokumen	434.736.800,00
5	02	02	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bengkalis	1 Laporan	1.287.078.730,00			1 Laporan	1.384.203.154,00
5	02	02	2.01	0006	Inventaris Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Bengkalis	1 Laporan	348.230.700,00			1 Laporan	348.230.700,00
5	02	02	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Bengkalis	1 Laporan	525.559.292			1 Laporan	525.559.292
5	02	02	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Bengkalis	1 Laporan	283.827.000			1 Laporan	283.827.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2026	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
5 02 02 2.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bengkalis	1 Laporan	370.000.000			1 Laporan	370.000.000
5 02 02 2.01 0010	Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bengkalis	1 Dokumen	447.874.000			1 Dokumen	447.874.000
5 02 02 2.01 0011	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bengkalis	1 Laporan	347.166.600			1 Laporan	347.166.600
5 02 02 2.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Bengkalis	1 Laporan	567.638.000			1 Laporan	567.638.000
5 02 02 2.01 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bengkalis	120 Orang	828.272.231			120 Orang	928.272.231
TOTAL						640.922.613.047			655.553.550.564

Bengkalis, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. AREADY
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750302 200212 1 004



BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2025.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Riau, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya

2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang masih memerlukan upaya keras
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan Penatausahaan Keuangan dan Penatausahaan Aset lebih baik lagi dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tanggal, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,



H. AREADY

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750302 200212 1 004